

Efektifitas Sistem Absensi Finger Print dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Sekretariat DPRD Buton

Sry Mayunita¹, Siti Hidayatul Jumaah²

¹Universitas Muhammadiyah Buton

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v1i2.19>

*Correspondensi: Siti Hidayatul Jumaah

Email: hidayatulj929@yahoo.com

Received: 18 Januari 2022

Accepted: 19 Februari 2022

Published: 31 Maret 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

finger print merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan, 3) tepat waktu, pegawai merasa termotivasi untuk datang tepat waktu, 4) tercapainya tujuan, tingginya angka kedatangan pegawai yang tepat waktu menunjukkan bahwa tujuan penerapan absensi finger print sudah tercapai, dan 5) perubahan nyata, dibuktikan dengan semakin rendahnya jumlah pegawai yang absen baik karena sakit, izin, cuti, dan lain sebagainya. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan absensi finger print di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Buton sudah cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Kata kunci: Finger Print, Absen, Kedisiplinan, PNS.

Abstrak: *The manual attendance system is no longer relevant, because it is easy to manipulate and is considered environmentally unfriendly. The manual attendance system is also called a waste of time and money, and causes violations of employee performance discipline. Therefore, to anticipate and minimize the occurrence of disciplinary violations, the use of the finger print attendance system has been implemented, including at the Secretariat of the Buton People's Representative Council. This study aims to determine the effectiveness of the application of finger print attendance to improve the discipline of Civil Servants at the Buton Regency DPRD Secretariat. The type of research used is descriptive qualitative, using data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The results of the study were seen from several indicators used to analyze, namely: 1) understanding, employees already understand and are able to adapt to the application of finger print attendance, 2) right on target, employees understand that finger print attendance is the right solution to improve discipline, 3) on time, employees feel motivated to come on time, 4) the achievement of goals, the high number of employees arriving on time shows that the purpose of implementing finger print attendance has been achieved, and 5) real changes, as evidenced by the lower number of employees who are absent either because of illness, permits, leave, and so on. The conclusion of this study is that the application of finger print attendance at the Secretariat of the Buton People's Representative Council is effective enough to improve employee discipline.*

Keywords: Finger Print, Absence, Discipline, Civil Servant.

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi pegawai pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu. Selain itu, pendisiplinan pegawai sangat perlu untuk meningkatkan citra, kerja, dan kinerja pegawai.

Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan (Muslikhun, Hasiolan, & Fathoni, 2016). Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 6 Juni 2010, terdiri dari 7 Bab dan 51 Pasal. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Guna mengetahui kehadiran pegawai, diperlukan sistem absensi yang dapat mencatat seluruh kehadiran. Absensi adalah sebuah pembuatan data untuk daftar kehadiran yang biasa digunakan bagi sebuah lembaga atau instansi yang sangat perlu membutuhkan sistem seperti ini (Nugoroho, 2009). Sedangkan menurut pendapat lain, absen adalah suatu pendataan atau pencatatan dari kehadiran karyawan ditempat kerja, bagian dari pelaporan aktifitas suatu perusahaan yang berisi sebuah data-data kehadiran karyawan yang disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu (Alda, 2014; Ibramsyah, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui absensi adalah suatu kegiatan pencatatan kehadiran untuk mengetahui kinerja seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan dengan adanya absen atasan jadi lebih mudah untuk mengetahui kehadiran pegawainya dan lebih mudah untuk membuat laporan kehadiran di suatu lembaga atau perusahaan. Jadi adanya system absensi untuk mencegah adanya kegiatan titip absen.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, terdapat sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan kehadiran tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan penggunaan *Finger Print* sebagai sistem absensi (Alam, 2013; Risfa, 2019).

Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan sedikitnya di 10 negara di dunia sudah menggunakan teknologi ini. Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi *Finger Print* di perusahaan atau instansi, alat ini mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin keamanan (Muchdarsyah, 2005). Dengan demikian, bukti kehadiran pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini. Tentu saja hal ini sangat membantu divisi sumber daya manusia untuk mengevaluasi kinerja para pegawai, contoh instansi yang menerapkan absensi *Finger Print* yaitu di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebuah organisasi yang besar dan kompleks yang tidak memungkinkan para anggota dewan bekerja sendirian. Tentunya sudah menjadi syarat yang mutlak anggota dewan tersebut dibantu oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah pegawai sekretariat dewan yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau oleh para wakil rakyat. Hal ini tentunya sangat diperlukan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan adalah merupakan bagian integral dari pemerintah baik kabupaten ataupun kota yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD. Melihat kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat DPRD tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dapat menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas DPRD maka sekretariat DPRD harus dapat berperan maksimal sesuai tugas dan fungsinya terutama dalam kedisiplinan pegawainya.

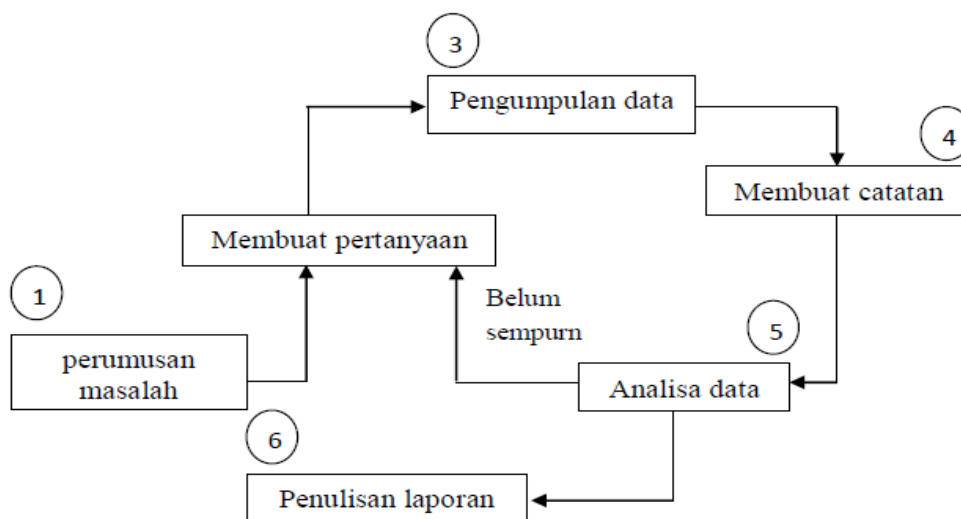
Sekretariat DPRD Kabupaten Buton merupakan salah satu kantor yang sudah menerapkan absensi sidik jari (*finger print*) sejak tanggal 10 Januari 2020. Sebelumnya di beberapa instansi menerapkan sistem absensi manual untuk mencatat daftar hadir pegawai, termasuk pada Lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Buton. Namun sistem absensi manual ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya sistem absensi manual mudah untuk dititipkan dan dimanipulasi. Sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai. Selain itu sistem absensi ini memerlukan biaya tambahan untuk membeli kertas untuk di jadikandaftar hadir pegawai. Disisi lain sistem absensi ini tidak ramah lingkungan karena menghabiskan banyak kertas, juga boros waktu dalam mengelola data kehadiran pegawai yang cukup lama prosesnya. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran kedisiplinan pegawai, maka mulai diterapkannya penggunaan sistem absensi *finger print* untuk merekam sidik jari dari setiap pegawai. Contohnya sidik jari, dan struktur wajah. Selain itu pelaksanaan sistem absensi biometri kini sudah banyak digunakan di suatu instansi yaitu absensi biometrik sidik jari (*fingerprint*), sebab ketentuan-ketentuan cara pakainya cukup sederhana, dan sulit untuk dimanipulasi.

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis efektifitas penerapan absensi *finger print* dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus kajian mengenai efektifitas penerapan absensi *finger print* dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif, yang memusatkan

perhatian pada masalah-masalah saat penelitian dilakukan, bersifat aktual, dan menggambarkan fakta-fakta tentang fenomena yang diteliti (Moleong, 2016; Sugiyono, 2008). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun bagan alir dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Buton, Staf Administrator/ Pengelola aplikasi *finger print*, dan 6 orang pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi staf bagian Kepegawaian, staf bagian perlengkapan dan aset, staf bagian umum, staf bagian risalah, staf bagian persidangan, dan staf bagian rumah tangga.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan tertulis, kamera untuk menghasilkan tangkapan observasi terhadap sistem absensi dan dokumen tertulis sebagai sumber data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buton

Sekretariat DPRD Kabupaten Buton berada di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Buton, yang beralamat di Kombeli, Ps. Wajo. Sekretariat DPRD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton merupakan unsur pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Buton yang sehari-hari dilaksanakan oleh para anggota Dewan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati Buton melalui Sekretaris Daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

Jumlah sumber daya manusia / personalia yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton sampai dengan tahun 2021 adalah 100 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (tenaga kontrak), dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

NO	Nama Bagian	Status Kepegawaian	
		PNS	Tenaga Kontrak
1.	<i>Bagian Risalah dan Sidang</i>	12	0
2.	<i>Bagian Upmum</i>	16	45
3.	<i>Bagian Keuangan</i>	12	6
4.	<i>Bagian Hukum dan Humas</i>	6	3
	<i>Jumlah</i>	46	46

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buton, 2021.

Sebagai cita-cita akan masa depan yang diinginkan, sekretariat DPRD Kabupaten Buton memiliki visi, yakni: "Terwujudnya Pelayanan Administratif yang Optimal kepada DPRD dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya". Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Buton selanjutnya menyusun misi sebagai berikut: 1) meningkatkan kemampuan dan keterampilan Aparatur Sekretariat DPRD, dan 2) melakukan upaya dengan langkah-langkah untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang.

Efektifitas Penerapan Absensi *Finger Print* dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton

Efektifitas penerapan absensi *finger print* dalam penelitian ini dianalisis dengan beberapa indikator, yaitu: 1) pemahaman program, 2) tepat sasaran, 3) tepat waktu, 4) tercapainya tujuan, dan 5) perubahan nyata. yang diungkapkan oleh (Hasibuan, 2012; Sinambela, 2012).

1. Pemahaman Program

Pada tahapan ini adalah tahapan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pegawai dalam mengaplikasikan penerapan absensi *Finger Print* dalam meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu staf bidang kepegawaian dan bidang perlengkapan, diketahui bahwa Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buton sebagian besar sudah bisa beradaptasi dengan mesin absensi *finger print* dan sudah paham dengan program absensi *finger print* karena sebelum penerapan absensi *finger print* dimulai Sekretaris DPRD Kabupaten Buton sudah memerintahkan pegawainya untuk melakukan uji coba penerapan absensi sidik jari terlebih dahulu, dan ada

pengarahan terlebih dahulu dari pengelola absensi *finger print* tentang tata cara penggunaan mesin absensi sidik jari (*finger print*).



Gambar 2. Mesin Absensi Sidik Jari (*Finger Print*)

Sumber: Observasi, 2021.

2. Tepat Sasaran

Indikator tepat sasaran disini untuk mengetahui sejauh mana ketepatan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam penggunaan absensi *finger print*. Adapun tujuan penggunaan absensi *finger print* oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Buton adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Kepegawaian Skeretraiat DPRD Kabupaten Buton, disebutkan bahwa penggunaan absensi *finger print* merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buton. Meskipun demikian, beliau lebih lanjut menuturkan bahwa penerapan absensi sidik jari tersebut belum sepenuhnya maksimal, sebab masih ada pegawai kurang disiplin, seperti: tidak ada di ruangan ketika jam kerja masih berlangsung dan kembali keruangan setelah mendekati jam pulang.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa selain absensi *finger print*, hal lain yang dapat mempengaruhi kedisiplinan pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton adalah adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dapat diperoleh dari absensi pegawai yang full dan kinerja pegawai yang baik. Namun, apabila pegawai melanggar kedisiplinan terkait kehadiran maupun kinerja, maka pegawai tersebut akan mendapat potongan TPP sebesar 0,3% dari total TPP yang seharusnya diterima.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah salah satu indikator dalam mengukur efektifitas untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem absensi *finger print* untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai terutama dalam ketepatan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf di Sekretaria DPRD Kabupaten Buton, menunjukkan bahwa dengan adanya absensi sidik jari ini, mereka merasa lebih termotivasi untuk datang ke kantor sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian juga menyebutkan bahwa dibandingkan dengan absensi manual, absensi sidik jari ini dianggap lebih mampu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, terutama mengenai kedatangan dan kepulangan mereka secara tepat waktu. Hal ini dilihat ditunjukkan dengan jumlah pegawai saat apel pagi selalu meningkat dari sebelum absensi sidik jari diterapkan. Data mengenai kehadiran pegawai yang datang secara tepat waktu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021

No.	Kategori	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Tepat Waktu	42 orang	91,3%
2.	Tidak Tepat Waktu	4 orang	8,7%
	Jumlah	46 orang	100%

Sumber: Olah data Sekunder, 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang hadir tepat waktu sebanyak 42 orang atau 91,3%, sedangkan pegawai yang terlambat (hadir tidak tepat waktu) hanya sebesar 4 orang atau 8,7%. Angka ini menunjukkan bahwa penerapan absensi *finger print* di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai, terutama dalam hal ketepatan waktu. Sebab mesin absensi *finger print* mencatat setiap waktu kedatangan para pegawai dengan detail, bahkan telat satu menit pun dapat mempengaruhi jumlah penilaian yang akan didapatkan pegawai, dan langsung otomatis akan dapat potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kemudian pendapatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didapatkan berdasarkan tingkat kehadiran PNS pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

4. Tercapainya Tujuan

Efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton menerapkan absensi *finger print* adalah untuk meningkatkan disiplin pegawainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya absensi elektronik atau *finger print*, kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton sudah sangat meningkat. Hal ini bisa dilihat pada tabel 2, dimana tingkat kehadiran pegawai secara tepat waktu sudah mencapai 91,3%. Beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan juga menunjukkan hal yang serupa, para pegawai menganggap bahwa dengan *finger print* mereka selalu termotivasi untuk datang dan pulang tepat waktu. Bahkan, beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa absensi sidik jari ini lebih bersifat memaksa, dimana pegawai mau tidak mau harus mengikuti aturan kedatangan dan kepulangan yang sudah di atur oleh mesin tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan absensi *finger print* ini sudah berhasil dicapai.

5. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata dalam penelitian ini adalah bentuk data asli perbandingan daftar rekapitulasi absensi manual dan sesudah menggunakan absensi *finger print*, untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan absensi *finger print* dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buton. Berikut data rekapitulasi absensi sebelum dan sesudah penerapan absensi *finger print*. Tabel 3 menyajikan data perbandingan rekapitulasi absensi secara manual pada Bulan Februari 2019 dan absensi menggunakan sistem *finger print* pada Bulan Mei 2021.

Tabel 3. Perbandingan Rekapitulasi Absensi Manual Vs *Finger Print*

No.	Keterangan Absensi	Sebelum (Feb 2019)		Sesudah (Mei 2021)	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Izin	20	43%	12	50%
2.	Sakit	6	13%	6	25%
3.	Cuti	-	-	-	-
4.	Tugas Dinas	2	4%	-	-
5.	Tanpa Keterangan	18	39%	6	25%
Jumlah		46	100%	24	100%

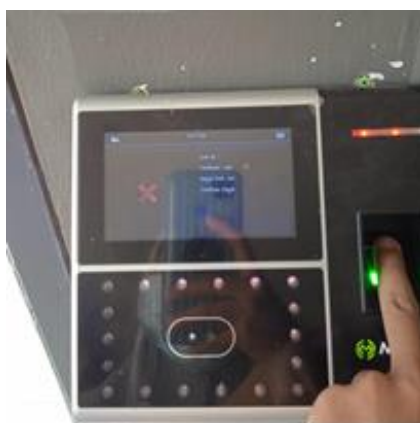
Sumber: Olah Data Sekunder, 2021.

Data di atas menunjukkan adanya perubahan absensi dari sebelum dan sesudah penerapan *finger print* di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton. Sebelumnya, jumlah pegawai yang absen baik dengan keterangan izin, sakit, cuti, tugas dinas, maupun tanpa keterangan sebanyak 46 kali, sementara setelah absensi *finger print* diterapkan, jumlah pegawai yang absen hanya mencapai 24 kali. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *finger print* dengan indikator perubahan nyata memiliki efektifitas dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Sekretarian DPRD Kabupaten Buton.

Faktor Penghambat dan Pendukung Efektifitas Penerapan Absensi *Finger Print* di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi, penghambat yang sering dialami pegawai di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buton dalam penerapan absensi *finger print* yaitu sistem yang seringkali eror saat digunakan, dan terkadang ada juga pegawai yang memiliki jari sensitif, sehingga posisi jari saat absen harus sesuai dengan apa yang dideteksi di awal saat proses daftar perekaman pertama menggunakan absensi sidik jari *finger print*. Selain itu, beberapa pegawai juga memiliki jari yang basah akibat keringat yang kemudian dapat menyebabkan sulitnya terdeteksi sidik jari saat diletakan pada sensor mesin *finger print*. Kendala lain yang turut menghambat penerapan absensi ini adalah sistem yang terkadang eror saat di gunakan, seperti contoh pada Gambar 2.



Gambar 3. Mesin Absensi *Finger Print* mengalami *Error* saat Digunakan

Sumber: Observasi, 2021.

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, salah satu faktor pendukung dalam penerapan absensi *finger print* di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buton adalah alat atau mesinya yang bagus bisa menyimpan energi listrik, jadi walaupun listrik dalam keadaan mati mesin absensi sidik jari (*finger print*) tetap bisa digunakan. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu sinyal wifi yang kuat dan kabel LAN yang masih baru sehingga dapat mempermudah pengelola pada saat mengunduh hasil rekapitulasi absensi pegawai setiap bulannya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan absensi *finger print* untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buton sudah cukup efektif. Hal ini dilihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis, yaitu: 1) pemahaman indikator, pegawai sudah memahami dan mampu beradaptasi terhadap penerapan absensi *finger print*, 2) tepat sasaran, pegawai memahami bahwa absensi *finger print* merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan, 3) tepat waktu, pegawai merasa termotivasi untuk datang tepat waktu, ini juga dibuktikan dengan data sebanyak 91,3% pegawai sudah datang sesuai dengan waktu yang disepakati, 4) tercapainya tujuan, tingginya angka kedatangan pegawai yang tepat waktu menunjukkan bahwa tujuan penerapan absensi *finger print* sudah tercapai, dan 5) perubahan nyata, dibuktikan dengan semakin rendahnya jumlah pegawai yang absen baik karena sakit, izin, cuti, dan lain sebagainya. Adapun faktor penghambat penerapan *finger print* yang ditemukan adalah sistem yang seringkali eror, sehingga tidak bisa membaca sidik jari pegawai. Sedangkan faktor pendukungnya adalah, *finger print* tidak sepenuhnya bergantung pada aliran listrik, sehingga meskipun listrik dalam keadaan mati, *finger print* masih tetap bisa digunakan.

Daftar Pustaka

- Alam, N. (2013). Perancangan Sistem Informasi Pendukung Laporan Absensi Elektronik BBPPKI Makassar. *Penerbit Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar* , 6 (1).
- Alda, N. A. (2014). *Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Finger Print (Sidik Jari) terhadap Disiplin Pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .
- Hasibuan, M. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibramsyah. (2013). *Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Muchdarsyah, S. (2005). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslikhun, Hasiolan, L. B., & Fathoni. (2016). Pengaruh Mekanisme Finger Print, Prosedur Finger Print, Pencapaian Target Finger Print terhadap Kedisiplinan Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. *Journal of Management* , 2 (2).
- Nugorocho, E. (2009). *Biometrika: Mengenal Sistem Identifikasi Masa Depan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Risfa, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Pegawai Pada Markas Komando Direktorat Pengamanan badan Pengusaha Batam. *Journal of Bussiness Administration* , 3 (1), 53-63.
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.